

# **BRIEF**

## **Dilema Bisnis Bukalapak: Antara Korupsi Negara dan Manipulasi Pasar**

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp21,9 triliun melalui penawaran umum perdana saham (IPO) pada tahun 2021, menjadikannya sebagai IPO terbesar dalam sejarah Bursa Efek Indonesia. Bukalapak hadir dengan banyak janji menarik soal keterbukaan dan rencana dana IPO untuk modal kerja yang membuat bisnis mereka semakin berkembang.

Namun, nasibnya kini telah berubah 180 derajat. Perusahaan dulu yang digadang-gadang sebagai perusahaan teknologi terbesar di Indonesia sehingga mendapat julukan “Unicorn” kini TUTUPLAPAK, mereka menutup usaha utamanya yaitu, marketplace dan sekarang hanya fokus berjualan pulsa.

Sungguh ironis ya?

Kok bisa Bukalapak bikin rekor di pasar modal Indonesia dengan berhasil ngumpulin dana IPO sampai Rp21,9 triliun?

Unicorn adalah istilah untuk startup yang memiliki valuasi lebih dari US\$1 miliar atau dalam Rupiah sekitar Rp 15 triliun . Salah satu faktor terbesar adalah Mantan Presiden Mulyono. Istilah ini semakin populer setelah digunakan oleh mantan Presiden Mulyono dalam debat capres. Pada awal pencatatan saham PT Bukalapak Tbk, harga nilai penawaran saham BUKA berada di harga Rp. 850. Lalu nilai penawaran mengalami kenaikan sebesar 24.71% yaitu di harga penawaran saham sebesar Rp. 1.060 dan berhasil meraup Rp21 Trilliun.

Didukung oleh berbagai pernyataan Pandu Sjahrir, sang keponakan LBP yang memegang jabatan sebagai Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Aftech, bagai mimpi yang menjadi kenyataan bahwa target IPO Bukalapak tercapai. Pandu meyakinkan para calon investor bahwa IPO Bukalapak bukan merupakan exit strategy dari para investor lama.

Lucunya dengan adanya kenaikan nilai penawaran saham BUKA, media sosial yaitu Twitter ramai dengan hashtag #BukalapakIPO. Hashtag ini diramaikan oleh pihak - pihak terutama para influencer yang dikenal oleh banyak orang. Influencer - influencer ini meramaikan twitter dengan membuat sebuah postingan yang menggugah dan menyatakan bahwa para influencer ini memiliki ketertarikan untuk membeli saham milik PT Bukalapak Tbk. Bahkan ada influencer yang menyatakan bahwa dia memang di endorse oleh PT Bukalapak Tbk untuk meramaikan hashtag #BukalapakIPO.

Pencapaian tersebut mendapat banyak pujian. Bahkan, sepuluh menteri kabinet Mulyono membuat video khusus untuk memberikan ucapan selamat—beberapa di antaranya masih menjabat hingga kini dan hanya bisa tertawa mendengar kondisi Bukalapak saat ini. Meskipun berbagai alasan dapat diberikan, kenyataannya, BUKA kini bisa dianggap sedang mengalami kebangkrutan. Harga sahamnya merosot hingga 88% sejak IPO artinya secara rata-rata saham BUKA turun sebesar 30% tiap tahunnya ; akumulasi kerugian pada Q3-2024 mencapai Rp9,3 triliun apabila dibandingkan pada tahun 2023 yang ruginya Rp8,7 triliun ternyata terdapat kenaikan dalam segi kerugian ; dan rugi operasionalnya tercatat sebesar Rp 545 miliar (Q3-2024).

Kalo kita liat di komitmen yang tertuang dalam prospektus IPO Bukalapak tahun 2021 itu dijelaskan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini telah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, dan akan dialokasikan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Perusahaan.

Dari awal perusahaan sudah rugi, lalu setelah disuntik dana IPO, dana yang katanya akan dialokasikan sebagai modal kerja, entah diinvestasikan kemana dan perusahaan tiba-tiba berubah menjadi perusahaan investasi dan rugi terus.

Prospektus merupakan patokan kita sebagai calon investor maupun masyarakat. Ibarat kita aja kalau mau minjam uang ke bank. Bank akan tanya uang nya mau digunakan untuk apa? Terus kita jawab untuk bangun rumah misalnya. Eh pas uangnya sudah cair ternyata malah dibeliin motor, apakah itu melanggar? Apakah prospektus ini bisa dikatakan suatu perjanjian antara perusahaan dengan calon investor nya? Dan bagaimana pertanggungjawabannya ? Kemana para investor harus mengadu?

Disini OJK memiliki peranan penting, kepercayaan masyarakat dan investor dipertaruhkan. Kalau praktik ini terus terjadi, tidak ada yang mau invest di Indonesia. Celakalah kita!

Dalam pemberitaan resmi berkelit bahwa mereka hanya menghentikan layanan penjualan fisik, namun perusahaan tidak tutup padahal itu merupakan bisnis utama mereka.

Hal yang tidak wajar dalam kasus BUKA adalah keterlibatan pejabat negara dalam proses IPO BUKA sehingga membuka spekulasi jangan-jangan pejabat dapat penjatahan juga.

Melansir prospektus penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) BUKA, keponakan Luhut Binsar Panjaitan ini menggenggam 14,85 juta saham BUKA atau setara dengan 0,01% dari total saham.

Rinciannya, Pandu secara pribadi memiliki saham seri A Bukalapak sebesar 0,015% dan saham seri B Bukalapak sebanyak 0,004%. Sebelum Bukalapak IPO Pandu memiliki saham sebanyak 13,37 juta saham BUKA, atau sekitar 0,01% dari total saham. Jumlahnya memang minoritas karena sebagian sudah dijual. Ini juga yang membuat Pandu sempat bersitegang dengan Grup Emtek. Tapi Grup Emtek tidak bisa berbuat apa-apa bagaimanapun Pandu Sjahrir adalah orang yang “meloloskan” BUKA hingga dapat bertengger di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dia lah yang mempunyai 'power' yang sampai mampu mengubah keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Agustinus Eddy Kristianto, bisnis utama BUKA adalah koneksi politik. Sejumlah pejabat ditempatkan pada posisi dan peran tertentu, dan itu menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan. Faktanya: mantan Menteri Keuangan jadi komisaris BUKA, misalnya. BUKA juga menjadi salah satu mitra program Kartu Pra Kerja di mana sebagai platform digital, BUKA mendapat Rp1 juta/peserta. Sampai saat ini tidak ada lembaga negara yang mengaudit berkaitan dengan kemana larinya duit negara yang triliunan rupiah akibat adanya transaksi jual-beli video karti Pra Kerja tersebut.

Sekitar 60% pasar seluler di Indonesia saat ini dikuasai oleh Telkomsel (TLKM), dengan jumlah penggunaannya mencapai 160 juta.

Namun, terdapat masalah besar: Komisaris Utama TLKM dan BUKA adalah orang yang sama, yaitu Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Selain itu, salah satu pendiri dan pemegang saham BUKA, Muhamad Fajrin Rasyid, yang juga merupakan Direksi TLKM sejak akhir 2020, menambah kompleksitas hubungan ini.

Intinya, meskipun harga saham BUKA berfluktuasi, keuntungan mereka tetap terjamin, karena mereka tetap menerima remunerasi berupa honor, tunjangan, dan tantiem dari BUMN TLKM. Fajrin, misalnya, mendapatkan Rp21,5 miliar pada 2022 dan Rp52,7 miliar pada 2023, sementara Bambang memperoleh Rp12 miliar pada 2022. Kini, mereka menantikan berapa banyak lagi yang akan mereka terima tahun ini.

Selain itu, saat IPO, Fajrin memiliki 2,7 miliar lembar saham BUKA, yang pada harga Rp850 mencapai nilai sekitar Rp2,3 triliun (CNBC). Meskipun harganya turun hingga 88% sekarang, sahamnya masih bernilai sekitar Rp260 miliar. Tentunya, ini merupakan kekayaan yang sangat besar. Masalahnya bukan pada seberapa besar kekayaan yang

mereka nikmati, tetapi apakah mereka harus membagikannya kepada pihak lain sebagai bentuk “balas budi.”

Kesimpulannya, aset utama bisnis BUKA adalah patron politik. Bisnis yang kurang berkembang tidak hanya disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga karena pengaruh patron mereka mulai memudar. Keputusan mereka untuk beralih ke bisnis pulsa yang sudah dikuasai oleh Telkomsel bisa dipandang sebagai langkah rasional sesuai dengan pola patron politik tersebut. Agustinus berpendapat bahwa afiliasi dan potensi konflik kepentingan akibat posisi ganda seperti Bambang dan Fajrin ini bisa menjadi pintu masuk untuk skandal besar di masa depan bagi TLKM.

Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar peduli pada rakyat, pemerintahan yang baik, dan pemberantasan korupsi, sekaranglah saat yang tepat untuk menghentikan praktik bisnis semacam ini.

Praktik serupa yang dilakukan oleh kelompok yang sama kemungkinan juga akan muncul di Danantara, yang bisa jadi akan merongrong pemerintahan Prabowo di masa depan.